

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodic, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 dan membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2020. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel secara luas melalui 1 (satu) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel.3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI SASARAN STRATEGIS
 “Tersedianya informasi keuangan daerah Kabupaten Malinau terkini secara cepat dan akurat serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel”

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Pada tabel 3.1 di atas dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja :

Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu opini BPK Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan. Pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini

mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Opini WTP BPK RI juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

Laporan Keuangan dari tahun 2018, laporan keuangan tahun 2019 dan laporan keuangan tahun 2020 telah mencapai target sesuai dengan yang diharapkan sehingga realisasi program kegiatan dapat dikatakan tepat sasaran yakni tersedianya Informasi Keuangan dan aset daerah Kabupaten Malinau terkini secara cepat dan akurat serta mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, Transparan dan akuntabel.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja berdasarkan sasaran yang diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rincian mengenai hasil

pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

TABEL. 3.2
LAPORAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TRIWULAN : IV TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun	Kinerja Triwulan		Program / Kegiatan	Besaran Anggaran Yang Digunakan (Rp)
				Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat dan akurat serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntabel.	Opini BPK	WTP	WTP	100%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.861.440.000,00
						2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 1.345.287.636,12
						3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Rp. 3.711.806.296,65
						4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Rp. 351.128.935,41
						5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah.	Rp. 38.136.739.698,03

Penjelasan terhadap capaian kinerja triwulan IV Tahun 2020

1. Analisis laporan capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah terhadap laporan evaluasi triwulan IV tahun 2020 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Sasaran strategis Badan Pengelolaan keuangan Daerah yakni; tersedianya informasi keuangan daerah kabupaten Malinau terkini secara cepat dan akurat serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik,

transparan dan akuntabel dalam meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan. Pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

2. Program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaras dengan besaran anggaran yang digunakan yakni; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap dana sebesar Rp. 4.861.440.000,00, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menyerap dana sebesar Rp. 1.345.287.636,12, Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur menyerap dana sebesar Rp. 3.711.806.296,65, Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa menyerap dana sebesar Rp. 351.128.935,41, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah menyerap dana sebesar Rp. 38.136.739.698,03 sehingga Opini WTP BPK RI dapat diperoleh dan ini menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya

sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

Sesuai dengan tabel 3.2 diatas analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Sebagaimana Pengukuran Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan penilaian sebagai berikut;

Dasar penilaian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Status Laporan Keuangan Daerah (OPINI BPK)= WTP

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Tahun 2020
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah perbandingan realisasi Status laporan keuangan daerah (Opini BPK) tahun 2020 yaitu WTP dengan realisasi tahun 2019

dengan opini WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2019.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Status	WTP	WTP	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Status laporan keuangan daerah (Opini BPK) tahun 2020 yaitu WTP dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan

daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

- a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
- b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
- c. Sumber daya manusia pengurus barang OPD/Pengurus Barang masih ada yang kurang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan dibidang aset.
- d. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.
- e. Dari sisi administrasi dan penyimpanan masih belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan Alternative maupun strategi sebagai berikut;

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran AP/IP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*) agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terulang dimasa yang akan datang.
- e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- g. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

- h. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
- i. Menyenggarakan bimtek dan sosialisasi terkait Surat Edaran penyusunan laporan keuangan.
- j. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- k. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- l. Menyenggarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	92,22 %	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,46
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,75
			3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76,87
			4. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	99,95
			5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,31

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya sehingga dapat disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 76,87% - 99,95% dan total realisasi mencapai 92,22% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia,

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagai koordinator penyusunan anggaran, perubahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina administrasi keuangan. Secara keseluruhan jumlah personil Aparatur Sipil BPKD adalah sebanyak 80 (delapan puluh) orang ASN . Komposisi Jabatan Struktural dalam organisasi BPKD yaitu: Eselon II sebanyak 1 (Satu) orang, Eselon III sebanyak 7 (tujuh) orang ditambah Sekretaris 1 (satu) orang, Eselon IV sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari Subbidang 18 (delapan belas) orang dan Subbagian 3 (tiga) orang, Staf sebanyak 50 (lima puluh).

Tabel. 3.6
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara BPKD Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

Instansi	Eselon				Jenis Kelamin		
	II	III	IV	Staf	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
BPKD	1	7	21	50	44	36	80

Sumber: Data Kepegawaian BPKD Tahun 2021

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara BPKD berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada table sebagai berikut:

Tabel. 3.7
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara BPKD Kab. Malinau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Instansi	Pendidikan							SD
	S 3	S2	S1	D III	D II	SLTA	SMP	
BPKD	1	12	27	12	-	21	-	-

Sumber: Data Kepegawaian BPKD Kab. Malinau 2021

Upaya efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 (tiga) dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta seperti Bank untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 44.921.246.037,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 48.406.402.566,09. Dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 76,87 % - 99,85 %. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan dalam program seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentasenya adalah sebesar 93,36%, kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 94,31 % dan kegiatan pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 99,95%.

C. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Untuk Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada penyajian tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Pengukuran Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Jenis Target Kuantitatif/kualitatif	Target	Formulasi/rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja	
							Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Kuantitatif	WTP	Nilai Opini BPK	Data LKPD	-	WTP	100 %

Pengukuran Indikator kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *Outcome* dengan realisasi kinerja Aktual tahun 2020 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

Dari Tabel 3.8 di atas, pencapaian sasaran dapat diukur dengan tingkat ketepatan waktu penyusunan APBD yang menjadi kewajiban dari setiap *stakeholder*, tepat waktu menjadi indikator bahwa proses pelaksanaan dari tahapan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan baik. Ketepatan waktu penyusunan APBD juga menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai strategi telah dilakukan diantaranya mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran sehingga mempercepat proses penginputan data, disamping itu dilakukan penyempurnaan sistem dari berbagai laporan serta menambah fitur-fitur kontrol sehingga pada saat perencanaan sampai dengan penganggaran mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan APBD tepat waktu merupakan indikator sasaran yang sudah direncanakan dengan target tepat waktu, hal ini menggambarkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan. Penetapan APBD tepat waktu tidak terlepas dari strategi yang dilakukan dengan memperhatikan dan meminimalisir permasalahan sehingga target dapat dicapai dengan optimal.

D. Realisasi Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 3.9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4,861,440,000.00	Rp. 4,543,278,257.00	93,46
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1,345,287,636.00	Rp. 1,207,425,559.00	89,75
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 3,711,806,296,65	Rp. 2,853,236,247.00	76,87
4.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 351,128,935,41	Rp. 350,966,000.00	99,95
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 38,136,739,698.03	Rp. 35,966339,974.00	94,31
Rata-Rata				90,86

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 76,87% - 99,95% dan total realisasi mencapai 92,22% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.